BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pelaksanaan SP2D, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari prosedur SP2D terletak pada prosesnya yang sudah baik, dan jelas. Hal ini mempersulit tindak kecurangan dalam pengajuan SP2D dikarenankan ketatnya proses verifikasi dari masa pengajuan sampai SP2D bisa dicairkan. Tetapi masih ada beberapa kendala yaitu memakan waktu yang cukup lama dari mulai awal mempersiapkan dokumen sampai proses pencairan dana, selain itu juga masih adanya kesalahan pada setiap pencatatan.
2. Pelaksanaan SP2D yaitu pertama dengan melakukan pengisian formulir yang benar dari pertama kali pengajuan SPP, setelah itu dilanjutkan ke SPM dan apabila dinyatakan lengkap oleh BUD baru diterbikan SP2D kemudian baru akan dicairkan dan yang terakhir adalah pembuatan SPJ oleh BUD sebagai bukti pertanggungjawaban si pengguna Anggaran unutk dijadikan bukti dan diarsipkan.
3. Hambatan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan SP2D adalah tidak semua SP2D dapat dicairkan mengingat kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlalu perlu dan tidak terlalu penting dalam kelangsungan dinas tersebut, selain itu keterlambatan dalam penanganan proses pencairan dana yang

4. mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman di akhir pelaporan nanti, serta adanya kesalahan dalam pencatatan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Proinsi Jawa Barat, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dan masukan bagi Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada masa yang akan datang, yaitu :

1. Dalam hal prosedur SP2D agar mempertahankan proses yang sudah berjalan dengan baik, tetapi alangkah baiknya jika prosesnya lebih dipermudah agar lebih menghemat waktu dalam pencairan dana.
2. Dalam pelaksanaan SP2D diharapkan agar pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat suatu sistem yang lebih memudahkan para pengguna atau pelaksana SP2D sehingga memudahkan para pengguna anggaran tersebut dapat mencairkan dana secepatnya tetapi tetap dalam awasan pihak-pihak terkait agar tidak terjadinya kecurangan atau penyelewengan.
3. Sebaiknya pemerintah memberikan sanksi atau teguran secara langsung kepada pegawai yang melakukan salah dalam pencatatan agar pegawai tersebut termotivasi untuk lebih teliti, serta memperbaharui proses pelaksanaan SP2D agar lebih cepat dan terpantau hingga tidak terjadi kelalai.